

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK UPAH LEMBUR PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. ALAT IRIGASI DAN BANGUNAN BAROKAH KOTA TASIKMALAYA

Upah yang diterima para pekerja saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ada selisih yang cukup signifikan antara upah yang seharusnya mereka terima dengan upah yang mereka dapatkan, ketidaksesuaian upah ini merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja. Upah yang adil tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarga mereka, tetapi juga akan mendorong produktivitas dan inovasi di tempat kerja.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak upah lembur pekerja, kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak upah lembur pekerja, serta upaya pelaksanaan pemenuhan hak upah lembur pekerja dihubungkan dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama dalam konteks pemenuhan hak upah lembur pekerja. Meskipun demikian, implementasi di lapangan sering kali menemui tantangan, seperti kurangnya pemahaman dari pengusaha mengenai kewajiban ini dan adanya pelanggaran yang merugikan pekerja.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan data, analisis kesimpulan dan laporan dengan metode pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak upah lembur pekerja dihubungkan dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Alat Irigasi Dan Bangunan Barokah Kota Tasikmalaya belum terlaksana sebagaimana mestinya karena ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemenuhan hak upah lembur pekerja di lapangan dengan ketentuan. Kendala yang dihadapi berasal dari internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hal tersebut yaitu meningkatkan pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh, memperkuat komitmen pengusaha, dan membangun budaya kerja yang sehat.

Diharapkan pihak perusahaan dapat menerapkan peraturan perundang-undangan terutama mengenai pemenuhan hak upah lembur pekerja agar tidak ada lagi kesenjangan diantara pemberi kerja dan penerima kerja serta terpenuhinya hak para pekerja.

Kata Kunci : Upah Lembur, Pekerja, Perusahaan

ABSTRACT

THE FULFILLMENT OF WORKERS' OVERTIME WAGE RIGHTS IS LINKED TO ARTICLE 31 OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 35 OF 2021 CONCERNING FIXED-TIME WORK AGREEMENTS, OUTSOURCING, WORKING TIME AND REST TIME AND TERMINATION OF EMPLOYMENT AT PT. ALAT IRIGASI DAN BANGUNAN BAROKAH TASIKMALAYA CITY

The wages received by the workers are currently not in accordance with the provisions that have been set. There is a significant difference between the wages they should receive and the wages they get, this wage mismatch is a form of injustice experienced by workers. Fair wages will not only improve the well-being of employees and their families, but will also encourage productivity and innovation in the workplace.

The problems studied in this thesis are how the implementation of the fulfillment of workers' overtime wage rights, obstacles in the implementation of the fulfillment of workers' overtime wage rights, and efforts to implement the fulfillment of workers' overtime wage rights are linked to Article 31 of Government Regulation Number 35 of 2021. This regulation aims to protect workers' rights, especially in the context of fulfilling workers' overtime wage rights. However, implementation in the field often encounters challenges, such as a lack of understanding from employers about this obligation and violations that harm workers.

The research method used in this study is a descriptive analysis method used to solve a problem by collecting data, analyzing conclusions and reports with an empirical juridical approach method.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the fulfillment of workers' overtime wage rights is linked to Article 31 of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time and Termination of Employment at PT. Irrigation equipment and Barokah buildings in Tasikmalaya City have not been implemented as they should because there are several discrepancies between the implementation of the fulfillment of workers' overtime wage rights in the field and the provisions. The obstacles faced come from internal and external. The efforts made by the company to overcome this are increasing the understanding of employers and workers, strengthening the commitment of employers, and building a healthy work culture.

It is hoped that the company can implement laws and regulations, especially regarding the fulfillment of workers' overtime wage rights so that there is no longer a gap between employers and recipients and the fulfillment of workers' rights.

Keywords: Overtime Wage, Workers, Companies